

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Amir M.S. 2003. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- A.Suriyaman Mustari Pide. 2020. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sijayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Prenadamedia Group Jakarta.
- Dewi Wulansari. 2018. *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Djamat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Jimmy Josses Sembiring. 2011. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia. Jakarta.
- Mustofa Wildan Suyuti. 2013. *Kode Etik Hakim*. Kencana. Jakarta.
- Sri Warjiyati. 2020, *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia*. Bogor
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta
- _____. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu.

Peraturan Menteri Negara Agrarian/ Kepala Badan pertanahan Nasional No. 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari.

C. Skripsi dan Jurnal

Ali Amran. 2017. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Minangkabau di Sumatra Barat." Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 3 No. 2, 2017

Dian Latifiani. 2015 "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim". Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 1 No. 1, 2015, Hlm. 21.

Hasneni. 2015“Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam”. Journal of Ialamic dan Social Studies Volume 1 No. 1. 2015.

D. Website

Ilman Hadi, “Tentang Positaa, Petitum, Replik dan Duplik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum/>, dikunjungi tanggal 25 November 2021 jam 14.36

Tri Jata Ayu Pramesti. “Litigasi dan Altenatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2021, Jam 19.20.

